

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, H. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta.
- Amirullah, M. Arief, 2003, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang (Reorientasi Kebijakan Penanggulangan & Kerjasama Internasional*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Amrani Hanafi, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang : Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Badaruddin Kiagus Ahmad, 2018, “*Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*”, Vol. 97/THN IX/2018, Maret 2018.
- Clarke Ronald V., 1995, *Situational Crime Prevention*, Vol 19 Crime and Justice.
- Garnasih Yenti, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Gloria Laycock and N. Tilley, 1995, *Implementing Crime Prevention*, Crime and Justice Press, Vol 19.
- Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang : Modus-modus pencucian uang di Indonesia (Money Laundering)*, Setara Press, Malang.
- H Soewarsono dan Reza Manthovani, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, CV Malibu, Jakarta.
- Husein Yunus, 2001, *Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries and Territories Oleh FATF On Money Laundering*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 16, hlm. 33.
- Indrati Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Kristiana Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Mertokusumo Sudikno, 1980, *Beberapa Azas Pembuktian Perdata dan Penerapannya dalam Praktek*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 3.

\_\_\_\_\_, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Mueller Gerhard O. W., 1998, *Transnational Crime, Definitions and Concepts*., dalam P. Williams dan D. Vlassis (eds), *Combating Transnational Crime, a Special Issue of Transnational Organized Crime*, 4 (3&4), Autum/Winter 1998, dalam Ralf Emmers, *The Securitization of Transnational Crime in ASEAN*, Institute of Defence and Strategic Studies Singapore No. 39, November 2002.

Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyoto, 2011, *Perjanjian : Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta.

Ngadirjarno, FX dkk, 2011, *Lelang Teori dan Praktik*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan, Jakarta.

Office of the comptroller of the Currency, 2003, *Money Laundering A Bankers Guide to Avoiding Problem*, Washionton DC.

Parthiana I Wayan, 1990, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung.

PPATK, tanpa tahun, *Modul E- Learning 2 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya*, Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan, Jakarta.

R.K Nobel and C.E. Columbic, 1997, *A new Anti-Crime Framework for The World : Merging the Objective and Subjective Model for Fighting Money Laundering*, *International Law and Politics*, Vol. 30,/

Siahaan, N.H.T, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafis, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, 1987, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT. ERESKO, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa.

Sumardjono, Maria, 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2007, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2016, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta.

White Robert, 1996, *The Politics and Practice of Situational Crime Prevention : Crime Prevention Studies*, Criminal Justice Press, Monsey, New York.

Yustiavandana, Ivan dkk, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor, Ghalia Indonesia.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Vendu Reglement tentang Peraturan Penjualan di Muka Umum di Indonesia  
Ordonansi 28 Pebruari 1908 LN. 08-1908 mulai berlaku 1 April 1908 dengan  
LN. 40-56 jo. 41 -3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. LNRI Tahun 2010 No. 122,  
TLNRI No. 5164.

Vendu Instruksi tentang Instruksi Lelang stb. 1908 Nomor 190 ditetapkan dalam  
Ordonansi 28 Pebruari 1908.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. LNRI Tahun 2015 No. 148, TLNRI 5709.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (Know Your Customer Principles). LNRI Tahun 2001, No. 78, TLNRI No. 4107.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customer Principles*), LNRI Tahun 2003, No. 111, TLNRI No. 4325.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I BNRI Tahun 2010 No. 474.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang. BNRI Tahun 2010 No. 476.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang BNRI Tahun 2016 No. 270.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II. BNRI Tahun 2017 No. 1771.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang. BNRI Tahun 2017 No. 1562.

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 3/KN/2016 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa.

Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-3/KN/2016 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa.

### **C. Internet**

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan, “Benahi Administrasi Pejabat Lelang Kelas II, Direktorat Lelang Adakan Pembinaan ke Kanwil”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/14627/Benahi-Administrasi-Pejabat-Lelang--Kelas--II--Direktorat--Lelang--Adakan--Pembinaan--ke-Kanwil.html> diakses pada tanggal 13 Juli 2018.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Kenali Pengguna Jasa Guna Antisipasi Upaya Money Laundering melalui Transaksi Lelang”,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2016/berita/baca/7872/Kenali-Pengguna-Jasa-Guna-Antisipasi-Upaya-Money-Laundering-melalui-Transaksi-Lelang.html>, diakses pada tanggal 13 Juli 2018.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Menjaga Reputasi DJKN melalui Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Lelang”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/11721/Menjaga-Reputasi-DJKN-Melalui-Prinsip-Mengenali-Pengguna-Jasa-Lelang.html>, diakses pada tanggal 02 Januari 2019.

Financial Action Task Force on Money Laundering, “Basic Facts about Money Laundering”, <http://www.oecd.org/fatf/mlaundering.en.htm> diakses pada tanggal 3 Juli 2018.

Financial Action Task Force, “Guidance on the Risk based approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing : High Level Principles and Procedures 1-2”, <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Layanan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)”, <https://www.polri.go.id/layanan-bpkb.php>, diakses pada tanggal 17 September 2018.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi, “Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”, <http://www.ppatk.go.id/files/Vol46BulletinStatistikDesember20130.pdf>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2018.

#### **D. Jurnal/ Penelitian/ Artikel**

Kristiyana, Risa 2017, “Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Prodi MKn, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Depok.

Listyaningsih, 2014, “Peranan Perbankan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, *Tesis*, Prodi MKn, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Depok.

Sari, Mudiana Permata, 2017, “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris sebagai Pihak Pelapor Terhadap Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Prodi MKn, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Depok.